GOVERNMENT SIZE DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



Skripsi Oleh:

ANGGIA MARSHANDA PUTRI

01031382126132

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

GOVERNMENT SIZE DAN RASIO KÈUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA **SELATAN**

Disusun oleh:

Nama

: Anggia Marshanda Putri

NIM

: 01031382126132

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 11 Maret 2025

Dr. Ika Sasti Ferina., S.E., M.Si., Ak NIP. 197802102001122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

GOVERNMENT SIZE DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Olch:

Nama

: Anggia Marshanda Putri

NIM

: 01031382126132

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Schtor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tenggal 23 April 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

> Ponitia Ujian Komprehensif Palembang, April 2024

Pembimbing,

Dr. Ika Sesti Forina., SB., M.Si., Ab

NIP. 197802102001122001

Mengetahui,

Ketup Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA NIP. 197212152003122001

iii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawahini,

Nama

: Anggia Marshanda Putri

NIM

: 01031382126132

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian

: Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

GOVERNMENT SIZE DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembimbing : Dr. Ika Sasti Ferina., SE., M.Si., Ak

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, April 2025 Pembuat Pernyataan,

Anggia iviaisiiaiiua i uiri NIM.01031382126132

E2EB7AJX652861587

MOTTO

" Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah;286)

PERSEMBAHAN

Allah SWT

Kedua Orangtuaku Tercinta

Seluruh sahabat dan teman

Almamaterku Kebanggaanku Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Government Sizedan Rasio Keuangan terhadap Financial Distress Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempruna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima masukan dan saran yang dapat membangun skripsi ini agar lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pohak serta bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 30 April 2025

Anggia Marshanda Putri NIM 01031382126132

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,M.Si.,Ak, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 2. Bapak Dr. Hendra Susanto,S.T.,M.H selaku penguji, terima kasih atas setiap masukan,kritik,dan saran yang telah diberikan. Semua itu menjadi pelajaran berharga bagi penulis.
- Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti.
- 4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
- 5. Berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi dan tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Palembang, Maret 2025

Anggia Marshanda Putri NIM 01031382126132

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa:

Nama

: Anggia Marshanda Putri

NIM

: 01031382126132

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi: Government Size dan Rasio Keuangan terhadap Financial

Distress Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan

Telah saya periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses-nya dan kami setujui untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, April 2025

Dosen Pembimbing,

NIP. 197802102001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

GOVERNMENT SIZE DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Anggia Marshanda Putri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah (government size) dan rasio keuangan terhadap financial distress pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup government size, kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government size memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress. Kemandirian keuangan rasio efektivitas dan efisiensi juga berperan dalam menentukan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Financial distress, government size, rasio efektivitas, rasio efisiensi, kemandirian keuangan daerah

Dosen Pembimbing

Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,M.Si.,Ak NIP.197802102001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti S.E., M.Acc., Ak., CA NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

GOVERNMENT SIZE AND FINANCIAL RATIO TOWARDS FINANCIAL DISTRESS OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:

Anggia Marshanda Putri

This study aims to analyze the effect of government size and financial ratios on financial distress of district/city governments in South Sumatra Province. The variables used in this study include government size, regional financial independence, effectiveness ratio, and efficiency ratio. The data used are secondary data from regional government financial reports for the period 2019-2023. The results of the study show that government size has a significant effect on financial distress. Financial independence the effectiveness and efficiency ratios also play a role in determining the financial condition of regional governments.

Keywords: Financial distress, government size, effectiveness ratio, efficiency ratio, regional financial independence

Chairman

Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak NIP.197802102001122001

Acknowledge,

On Behalf of Head Accounting Department

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA NIP. 197212152003122001

RIWAYATHIDUP

DATAPRIBADI

Nama Mahasiswa : Anggia Marshanda Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Maret 2005

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Perumahan Muhajirin Residen, Lr. Muhajirin 4

Blok B5

Email : anggia.anggia15@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 21 Palembang

Sekolah Menengah Pertama : SMP Xaverius 1 Palembang

Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 10 Palembang

Pendidikan Tinggi : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

PENGALAMANORGANISASI

DAFTAR ISI

LEN	ABAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEN	IBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SUR	AT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH	iv
MO'	ТТО	v
PER	SEMBAHAN	.xvi
KAT	TA PENGANTAR	vi
UCA	APAN TERIMA KASIH	. vii
SUR	AT PERNYATAN ABSTRAK	ix
ABS	STRAK	X
ABS	TRACT	xi
RIW	AYAT HIDUP	. xii
DAF	TTAR ISI	xiii
BAB	B I PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar belakang	1
1.2.	Perumusan Masalah	9
1.3.	Tujuan Penelitian	9
1.4.	Manfaat Penelitian	10
	1.4.1.Manfaat Teoritis	10
	1.4.2.Manfaat Praktis	10
BAB	B II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.	Landasan Teori	11
	2.1.1.Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource DependencyTheory)	11
	2.1.2.Teori Keagenan	13
	2.1.3. Financial Distress	18
	2.1.4. GovernmentSize	19
	2.1.5. KemandirianKeuangan Daerah	
	2.1.6. RasioEfisiensi	22
	2.1.7. RasioEfektivitas	23
2.2.	PenelitianTerdahulu	
2.3.	Alur Pikir dan Hipotesis	28
	2.3.1.Hubungan GovernmentSize Terhadap Financial Distress	
	2.3.2. Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Financial Distress.	
	2.3.3.Hubungan Rasio Efektifitas Terhadap <i>Financial Distress</i>	
	2.3.4. Hubungan Rasio Efisiensi Berpengaruh Terhadap Financial Distress	32

3.1.	Jenis dan Sumber Data	34
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.	Populasi dan Sampel	35
3.4.	Instrumen Penelitian	36
	3.4.1.Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
3.5.	Uji Validitas	37
3.6.	Uji Reabilitas	37
3.7.	Teknik Analisis	37
3.8.	Uji Asumsi Klasik	38
	3.8.1.Uji Normalitas	38
	3.8.2.Uji Heteroskedastisitas	38
	3.8.3.Uji Multikolinieritas	39
3.9.	Regresi Linier Berganda	40
3.10.	Uji Hipotesis	41
	3.10.1.Koefisien Determinan (R ²)	41
	3.10.2.Uji t-Statistik	42
3.11.	Definisi Operasional Variabel	42
3.10.	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	43
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	44
4.1.	Hasil Penelitian	44
	4.1.1.Uji Asumsi Klasik	44
4.2.	Hasil Analisis Data	47
	4.2.1. Hasil Analisis Regresi	47
	4.2.2.Hasil Pengujian Hipotesis.	50
4.3.	Pembahasan Penelitian	52
	4.3.1.Pengaruh Government Sizeterhadap Financial Distress	52
	4.3.2.Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap <i>Financial Distress</i>	54
	4.3.3.Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Financial Distress	57
	4.3.4.Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Financial Distress	59
BAB	V PENUTUP	61
5.1.	Kesimpulan Penelitian	61
5.2.	Saran Penelitian	62
5.3.	Implikasi Penelitian	63
DAE	TAR PIISTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Presentase Belanja Modal dan Total Belanja Daerah Tahun	n 2023 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Daftar Populasi Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	35
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi	
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliablitas Government Size (X ₁), Kemandirian K	
Rasio Efektifitas (X ₃) dan Rasio Efisiensi (X ₄)	50
Tabel 4.7 Hasil Uji t Regresi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Belanja Modal dan Total Belanja Daerah Tahun 2023.......3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data	. 64
Lampiran 2.Olah Data	. 80

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Landasan Teori

Era globalisasi yang dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung baik di tingkat domestik maupun global. Berdasarkan kewenangan yang diberikan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, pemerintahan daerah diberikan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk menghindari potensi financialdistressan mencapai kesejahteraan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara secara efektif dan penuh tanggung jawab.

Financial distress dapat diartikan sebagai ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang berdampak pada stabilitas finansial dan operasional. Pradana & Sarjiyanto, (2023) menjelaskan bahwa kesulitan keuangan muncul ketika suatu entitas gagal dalam melakukan pembayaran, mengakibatkan gangguan dalam siklus operasional dan penurunan laba. Meskipun konsep ini lebih umum dikenal dalam sektor swasta, dampaknya kini mulai meluas ke sektor publik, termasuk pemerintah daerah. Di sektor publik, pinjaman sering kali tidak diatur dengan ketat terkait suku bunga, melainkan digunakan sebagai sarana untuk pembiayaan atau investasi Zakia & Setiawan, (2021). Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksanggupan pemerintahan daerah dalam mempertahankan standar pelayanan publik yang ditetapkan.Salah satu ciri

penting dalam laporan keuangan yaiturelevansi, yang membantu dalam memberikan sinyal tersebut untuk memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Penyebab utama*financialdistress* salah satunya adalah ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal.

Berikut adalah perbandingan data realisasi Belanja Modal dan Total Belanja Daerah pada 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, sepertiterlihat pada tabel 1.1.:

Tabel 1.1PresentaseBelanja Modal dan Total BelanjaDaerahTahun 2023

Kota/Kabupaten	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Y
Kab. Banyuasin	Rp. 398.549.814.167,37	Rp. 2.527.747.645.740,90	15,77%
Kab. Empat Lawang	Rp 252.718.669.399,00	Rp. 1.055.694.843.586,00	23,94%
Kab. Lahat	Rp. 1.110.490.579.102,25	Rp. 3.082.887.978.348,27	36,02%
Kab. Muara Enim	Rp 1.018.994.610.340,04	Rp. 3.336.289.056.357,12	30,54%
Kab. Musi Banyuasin	Rp. 756.123.871.417,92	Rp. 3.623.039.910.364,02	20,87%
Kab. Musi Rawas	Rp. 491.525.293.889,86	Rp. 1.967.931.040.605,42	24,98%
Kab. Musi Rawas Utara	Rp.638.060.433.468,00	Rp. 1.381.412.428.367,00	46,19%
Kab. Ogan Ilir	Rp. 465.824.217.347,00	Rp. 1.847.726.317.657,83	25,21%
Kab. Organ Komering Ilir	Rp. 480.942.840.966,00	Rp. 2.524.195.363.826,00	19,05%
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp. 239.520.792.220,00	Rp. 1.202.995.958.336,00	19,91%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

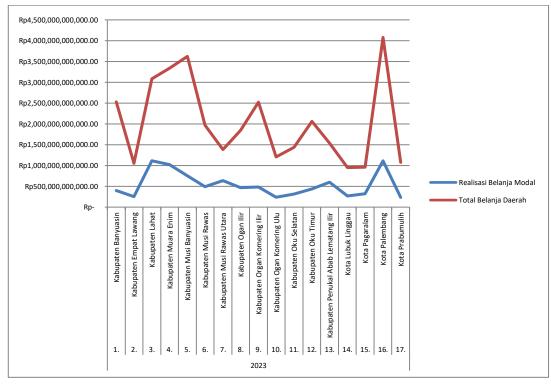
Tabel 1.2PresentaseBelanja Modal dan Total BelanjaDaerahTahun 2023

Kab.Oku Selatan	Rp.	313.539.401.548,00	Rp. 1.437.247.362.169,02	21,82%
Kab.Oku Timur	Rp.	440.803.582.248,69	Rp. 2.059.751.398.344,14	21,40%
Kab.PAbab Lematang	Rp.	601.757.520.033,72	Rp. 1.537.427.723.575,97	39,14%

Ilir		
Kota Lubuk Linggau	Rp. 264.268.828.263,35	Rp. 950.238.615.139,36 27,81%
Kota Pagaralam	Rp. 321.185.986.872,00	Rp 961.504.848.517,85 33,40%
Kota Palembang	Rp.1.111.611.852.949,77	Rp. 4.077.732.592.510,82 27,26%
Kota Prabumulih	Rp. 233.487.862.056,73	Rp. 1.077.610.257.595,47 21,67%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Gambar 1. 1GrafikBelanja Modal dan Total Belanja Daerah Tahun 2023



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa "Realisasi Belanja Modal" memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan "Total Belanja Daerah" di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023. Tren Total Belanja Daerah (garis oranye) menunjukkan fluktuasi yang signifikan di antara kabupaten/kota, dengan beberapa daerah mencatatkan pengeluaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Sebaliknya, Realisasi Belanja Modal (garis biru) cenderung stabil dan berada pada tingkat yang rendah di hampir seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja modal terhadap total belanja daerah relatif kecil, yang bisa menjadi indikasi bahwa pengeluaran daerah lebih difokuskan pada belanja operasional daripada investasi dalam aset atau infrastruktur. Kabupaten/kota tertentu seperti Kabupaten Banyuasin atau Kota Palembang tampak memiliki belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang mungkin mencerminkan skala ekonomi atau prioritas pengeluaran yang berbeda.

Selama periode 2019 hingga 2023, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi menyebabkan financialdistress. Realisasi belanja daerah hanya mencapai 17% dari total belanja, sementara belanja pegawai mencapai 19%, menunjukkan proporsi belanja yang kurang optimalDewata et al., (2023). Kondisi ini mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada belanja operasional dibandingkan dengan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengatasi potensi financialdistress, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian keuangan dengan menggali sumber pendapatan lokal dan mengelola belanja daerah secara efisien. Upaya pencegahan telah dilakukan melalui sosialisasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang financialdistress dan langkah-langkah pencegahannyaDewata et al., (2023) . Langkahlangkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keuangan daerah dan mencegah terjadinya financialdistress di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan belanja pemerintah pusat mungkin kurang efektif jika belanja pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan belanja masyarakat.

Sehingga perlu dilakukan rekturuasi, untuk menghindari *financialdistress*I. Pradana & Sarjiyanto, (2023). Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ketentuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Negara, kesulitan keuangan dapat terjadi jika pangsa modal masing-masing daerah terhadap total luas wilayahnya kurang dari 30% dari total pangsa modal yang ditetapkan I. Pradana & Sarjiyanto, (2023). Perkembangan ekonomi nasional dan global juga mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Indonesia, yang saat ini berada dalam fase transisi menuju ekonomi digital, membutuhkan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghadapi tantangan ini Kane Farabaugh, (2013).

Sumatera Selatan terdiri dari berbagai kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda serta menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan fiskal daerah.Perbedaan-perbedaan ini menciptakan hubungan kekuasaan yang kompleks, terutama dalam hal mencapai stabilitas keuangan.Salah satu elemen yang berkontribusi secara signifikan dalam munculnyafinancialdistressyaituGovernmentSize.

Governmentsizeatau ukuran pemerintah mengacu pada besar ataukecilnya peran pemerintah dalam perekonomian yang diukur melalui persentase pengeluaran pemerintah terhadap total aset pemerintah daerah atau Produk Domestik Bruto atau total aset pemerintah daerah. Governmentsizesering dikaitkan dengan kebijakan fiskal yang mendorong kegiatan ekonomi selama resesi menimbulkan beban kewajiban, neraca pada pemerintah daerah Udayana etal., (2022). GovernmentSizeberpengaruh signifikan terhadap risiko financialdistress, tetapi dampak tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola anggarannya dan seberapa efisien sumber daya

digunakan. *Governmentsize*bisa dikaitkan dengan luas wilayah yang mempunyai batasbatas sehingga pemda memberikan pelayanan mengindikasikan kepailitan masingmasing wilayah I. Wulandari etal., (2018).

Menurut Illahi etal. (2021), Kemandirian Keuangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimanfaatkanuntuk memenuhi kebutuhan dalam pemerintah, layanan publik, serta pengembangan wilayah tidak harus tergantung kepada pemerintah pusat, mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhannya sendiridan membelanjakan lebih banyak uang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian yang dilakukanRahmatika& Imron, (2022) bahwa daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang minim dan selalu berharap pada transfer pemerintah pusat akan mengalami financialdistress. Sejalan dengan Elfiyana& Arza, (2022) menjelaskan jika pemerintah memiliki kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah dalam pemenuhan kebutuhan untuk melaksanakan sistem dan pelayanan kepada masyarakat maka financialdistress semakin kecil kemungkinan terjadi dibandingkan kemandirian keuangan yang rendah. Untuk mengukur kemandirian keuangan Pendapatan Asli Daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerah Pinasti&Poerwati, (2022). Berbeda hasil penelitian Rahmi & Sari, (2023) bahwa rasio kemandirian keuangan tidak memiliki dampak terhadap *financial distress*.

Rasio efektivitas merupakan ukuran yang dipakai dalam menilai sejauh mana suatu entitas mampu mencapai hasil yang diinginkan, serta dampaknya terhadap krisis keuangan, yaitu masalah keuangan yang dapat mengancam kelangsungan biaya operasional yang berbeda. dengan rasio efisiensi yang lebih berfokus pada cara pembiayaan belanja modal atau kegiatan pemerintah, seperti hasil penelitian Elfiyana&

Arza, (2022) menemukan rasio efektivitas memiliki dampak terhadap *financialdistress*, rasio efektivitas tinggi menyebabkan pemerintah daerah mengalami masalah keuangan distres. Apabila rasio efektivitas tinggi mengindikasikan pemerintah daerah mengalami *financialdistress*pada suatu daerah jika resikonya rendah yang dapat digambarkan melalui kinerja keuangan pemerintahan daerah dari penggunaan pendapatan daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Rahmi & Sari, (2023) bahwa rasio efektivitas berdampak positif (baik) terhadap *financialdistress*. Berbeda dengan penelitian yangtelah dilakukan oleh I. Wulandari et al., (2018) menunjukkan bahwa rasio efektivitas berdampaknegatif dan tidak signifikan terhadap *financialdistress*.

Rasio efisiensi, menurut hasil penelitian Laliya nur, (2024) mengukur seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai tujuan keuangan dan non-keuangan, menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat mengatur pengeluaran, mengoptimalkan pendapatan, membagi pendapatan, dan anggaran yang tepat sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi yang lebih rendah mampu mengurangi dana yang dialokasikan pengeluaran langsung yang terkait dengan aktivitas operasional. Menurut Ningrum & Sholihah, (2023) rasio efektivitas dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan nilai predikat, apabila lebih dari 100 % pemerintah daerah efektif dalam mengelola keuangannya, 80-90% cukup efektif dan dibawah 60 % disimpulkan ada pemborosan anggaran atau tidak efektif dilakukan. Rasio yang kecil dan efisien menggambarkan jika pemerintah daerah dapat meminimalkan biaya operasional dengan mengacu pada pendapatan daerah secara riil untuk mengalokasikan belanja modal dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat. Sejalan dengan Elfiyana& Arza, (2022) menemukan nilai rasio efektivitas mempunyaiefekterhadapfinancialdistress. Berbeda dengan Zakia & Setiawan, (2021)

bahwa nilai rasio efisiensi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kesulitan keuangan.

Sasaranpenelitian ini, yaituuntuk menyajikan data empiris tentang variabelvariabel yangberpengaruhterhadaptingkat stress fiskal pemerintahan daerah dan kota diSumateraSelatan.Dalam konteks ini, penelitian ini juga mempertimbangkan pentingnya penerapan metode pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan mudah beradaptasi terhadap perubahan global.Perubahan tersebut mencakup dinamika yang didorong oleh kemajuan ekonomi dan teknologi yang semakin mempercepat perubahan di berbagai aspek pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, hasil kajian diharapkan bahwa ini dapat memberikan usulan strategis kepada pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan fiskal di era yang semakin kompleks dan terintegrasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pengaruh *GovernmentSize* terhadap terhadap
- 2. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan daerah terhadap terhada
- 3. Bagaimana pengaruh Rasio Efisiensi terhadap *financialdistress?*
- 4. Bagaimana pengaruh Rasio Efektivitas terhadap *financialdistress*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh GovernmentSize terhadap financialdistress.
- 2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap *financialdistress*.
- 3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh rasio efisiensi terhadap financialdistress.
- 4. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh rasio efektivitas terhadap *financialdistress*.

1.4. Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memperluas wawasan dalam memahami factor-factor yang menyebabkan terjadinya financial distress pada pemerintah, meliputi kemandirian keuangan daerah, Government Size, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Membantu pengguna laporan keuangan mengetahui apakah kondisi keuangan pemerintahan daerah sehat atau tidak, yang akan membantu pihak stakeholder membuat keputusan.
- Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi keuangan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 544–555.
- Dewata, E., Sari, Y., Febrianti, D., & Jauhari, H. (2023). Sosialisasi Upaya Pencegahan Financial Distress Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(6), 915–921. https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i6.199
- Donatella, P. (2020). Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities. *Public Money and Management*, 40(2), 122–130. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667684
- Elfiyana, & Arza, F. I. (2022). The Influence of Local Government Characteristics and Financial Factors on Financial Distress Conditions in Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437.
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Pareso Jurnal*, *3*(3), 543–556.
- Kane Farabaugh. (2013). *Kota Detroit di Amerika Ajukan Pailit*. Https://Www.Voaindonesia.Com/.
- Laliya nur, D. (2024). Kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio solvabilitas anggaran, pertumbuhan terhadap financial distress pemeritah daerah.
- Ningrum, D. T., & Sholihah, R. A. (2023). the Influence of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress. *Riset*, 5(1), 098–112. https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.226
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 119. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802
- Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *3*(5), 2477–1783.

- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pe. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425. https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566
- Udayana, K. A., Hidayat, A. S., & Yuniati, S. A. (2022). Relevansi Skala Optimum Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Financial Distress Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *3*(1), 71–89. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426
- Widiarini, K. D., & Yasa, G. W. (2024). Journal Of Social Science Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1258–1270.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639
- Wulandari, Y., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(3), 653–671. https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387